



AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Dr.Akhmad Yafiz Syam, M.Si.,Ak.,CA

Deskripsi

Buku 'Akuntansi Keuangan Daerah' ini menawarkan eksplorasi komprehensif tentang prinsip dan praktik akuntansi yang unik dalam pemerintahan daerah. Buku ini membimbing pembaca melalui konsep-konsep penting akuntansi keuangan daerah, dimulai dengan lingkungan dasar dan berlanjut ke topik lanjutan seperti akuntansi biaya, manajemen persediaan, dan pelaporan keuangan. Dirancang untuk mahasiswa dan praktisi, buku ini memberikan pemahaman yang jelas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), seluk-beluk siklus keuangan daerah, dan mekanisme audit keuangan. Contoh dunia nyata dan aplikasi praktis ditekankan, menjadikan buku ini panduan yang sangat diperlukan bagi siapa pun yang ingin menguasai kompleksitas administrasi keuangan di sektor publik.

Kata Pengantar

Berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT, buku Akuntansi Keuangan Daerah ini dapat terselesaikan. Dalam ranah administrasi publik, pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak dapat diabaikan. Buku 'Akuntansi Keuangan Daerah' ini disusun untuk menjadi panduan bagi mereka yang menavigasi lanskap akuntansi pemerintahan daerah yang seringkali rumit. Buku ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan aplikasi praktis, memberikan pemahaman yang kuat tentang prinsip dan prosedur akuntansi yang mendasari tata kelola yang efektif.

Perjalanan melalui bab-bab ini akan membekali pembaca dengan keterampilan untuk menafsirkan dan menganalisis data keuangan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dari prinsip dasar SAP hingga kompleksitas kemitraan antar pemerintah, teks ini menawarkan pandangan holistik tentang ekosistem keuangan dalam tata kelola daerah.

Penulis, dengan segala keterbatasan yang ada, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para kontributor dan peninjau yang keahlian dan dedikasinya telah membentuk karya ini. Harapan saya, buku ini akan memberdayakan generasi baru profesional yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas keuangan tertinggi dalam melayani masyarakat mereka.

Banjarmasin 2025
Penulis

Daftar Isi

DESKRIPSI.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	I
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
BAB 2: LINGKUNGAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.....	9
BAB 3: STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP).....	13
BAB 4: SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.....	17
BAB 5: PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.....	19
BAB 6: AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG DAERAH.....	21
BAB 7: AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN.....	31
BAB 8: AKUNTANSI BELANJA MODAL DAN ASET.....	47
BAB 9: AKUNTANSI BIAYA.....	1
BAB 10: AKUNTANSI PERSEDIAAN DALAM PEMERINTAH DAERAH.....	10
BAB 11: AKUNTANSI PEMBIAYAAN, INVESTASI, DAN KEWAJIBAN.....	21
BAB 12: LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	31
BAB 13: AKUNTANSI DANA CADANGAN, DAN TRANSAKSI NON ANGGARAN.....	42
BAB 14: PEMERIKSAAN DAN EVALUASI LAPORAN KEUANGAN DAERAH.....	48
BAB 15: AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, JURNAL PENYESUAIAN DAN JURNAL PENUTUP.....	54
BAB 16: KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN DAERAH.....	58
PENUTUP.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
GLOSARIUM.....	65

Daftar Gambar

Gambar 1 Hubungan Antarentitas	3
Gambar 2 Struktur Keuangan Daerah	11
Gambar 3 Pentingnya Persamaan Dasar Akuntansi	20
Gambar 4 Metode Penghitungan Biaya	4
Gambar 5 Karakteristik Dana Cadangan.....	44
Gambar 6 Prosedur Konsolidasi.....	60

Daftar Tabel

Tabel 1 Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Privat	4
Tabel 2 Lembaga dan Perannya.....	5
Tabel 3 Jenis Opini Hasil Audit	5
Tabel 4 Jenis Lembaga dan Perannya.....	9
Tabel 5 Basis Akuntansi Keuangan Daerah	15
Tabel 6 Tahapan Siklus AKD.....	17
Tabel 7 Komponen Persamaan Dasar AKD	19
Tabel 8 Pendapatan LRA dan Pendapatan LO.....	22
Tabel 9 Jenis Piutang.....	25
Tabel 10 Jenis Beban.....	39
Tabel 11 Jenis Biaya	2
Tabel 12 Jenis-jenis Persediaan.....	11
Tabel 13 Komponen LKD	33

Bab 1: Pendahuluan

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup akuntansi keuangan daerah.
2. Memahami karakteristik sektor publik dan perbedaannya dengan sektor privat.
3. Mengidentifikasi peran dan urgensi akuntansi keuangan daerah dalam tata kelola pemerintahan.
4. Menjelaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses yang sistematis meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan tujuan utama untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal. Informasi ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Abdul Halim (2012:35), akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai:

"Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan."

Definisi ini menekankan bahwa akuntansi keuangan daerah tidak hanya sekadar mencatat transaksi, tetapi juga menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa:

"Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah."

Dengan demikian, akuntansi keuangan daerah adalah implementasi dari prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. Laporan keuangan ini menjadi wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Ruang Lingkup Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah meliputi kegiatan keuangan dari:

- Entitas akuntansi dan entitas pelaporan seperti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), BUMD, dan lembaga daerah lain.
- Seluruh transaksi terkait penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban daerah.
- Proses pelaporan yang menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seperti LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LO (Laporan Operasional), Neraca, dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Ruang lingkup ini juga mencakup pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan oleh SAP berbasis akrual sejak tahun 2015.

Entitas Akuntansi & Entitas Pelaporan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah, **entitas akuntansi** dan **entitas pelaporan** merupakan dua struktur penting yang berperan dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan penyusunan laporan keuangan yang andal, akuntabel, dan transparan.

1. Pengertian

Entitas Akuntansi:

Unit organisasi pada pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan anggaran dan menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan.

(Dasar hukum: PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 64 Tahun 2013)

Entitas Pelaporan:

Unit organisasi yang menyusun laporan keuangan dari entitas akuntansi di bawahnya serta menyajikannya sebagai laporan konsolidasian. Entitas pelaporan bertanggung jawab menyampaikan informasi keuangan secara menyeluruh.

(Contohnya: Pemerintah Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala entitas pelaporan)

2. Klasifikasi Entitas

Jenis	Contoh Unit	Peran Utama
Entitas Akuntansi	SKPD, BUMD, UPTD	Melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan unit kerja
Entitas Pelaporan	Pemerintah Daerah	Mengonsolidasikan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi

3. Lembaga/Badan Terkait dan Fungsinya

a. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Merupakan **entitas akuntansi** yang juga bisa menjadi **entitas pelaporan internal** bagi unit-unit kerja di bawahnya (UPTD, Puskesmas, dll).

Contoh SKPD: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah.

Tugas:

- Mengelola anggaran belanja dan pendapatan yang dialokasikan melalui APBD.
- Menyusun Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, LO, LPE, CaLK, dll).

b. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

BUMD adalah **entitas hukum tersendiri**, berbentuk PT atau Perumda, yang dimiliki oleh Pemda. Statusnya adalah entitas akuntansi dan **tidak secara langsung dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Pemda** (diperlakukan sebagai investasi permanen).

Contoh: Bank Pembangunan Daerah, PDAM, Perusahaan Pasar, Perumda Air Minum.

Tugas:

- Menjalankan usaha daerah.
- Menyusun laporan keuangan sesuai PSAK (bukan SAP).
- Memberikan dividen kepada Pemda (jika untung).

c. UPTD dan UPT (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Unit teknis dari SKPD.

Bukan entitas akuntansi, tetapi menyampaikan laporan transaksi kepada SKPD induk.

Contoh: UPTD Puskesmas, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

d. BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

Bagian dari SKPD yang diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Contoh: RSUD, Puskesmas BLUD, Laboratorium Kesehatan.

Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dengan fleksibilitas tertentu (berlaku SAP dengan penguatan manajemen keuangan).

Tugas Khusus:

- Memberikan layanan publik.
- Menerima dan mengelola pendapatan secara langsung (tidak langsung ke kas daerah).
- Menyusun laporan keuangan mandiri.

4. Hubungan Antar Entitas

Konsolidasi Laporan Keuangan:

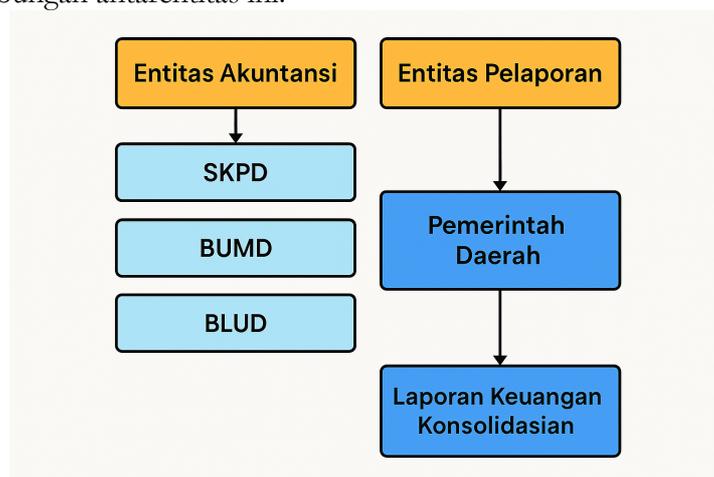
- SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan dan mengirim ke BPKAD/BPKA sebagai unit akuntansi utama.
- Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan konsolidasian dari seluruh SKPD.
- BUMD dan BLUD tidak dikonsolidasikan secara penuh tetapi disajikan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari investasi atau pengungkapan lainnya.

5. Output Akhir

Laporan keuangan yang disusun oleh entitas pelaporan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berikut gambar hubungan antarentitas ini:



Gambar 1 Hubungan Antarentitas

1.3 Karakteristik Sektor Publik vs Sektor Privat

Tabel 1 Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Privat

Aspek	Sektor Publik	Sektor Privat
Tujuan Utama	Pelayanan masyarakat (public service)	Mencari keuntungan (profit oriented)
Sumber Dana	Pajak, retribusi, dana transfer	Penjualan barang/jasa, modal investor
Akuntabilitas	Kepada publik dan lembaga pemeriksa (BPK)	Kepada pemegang saham/owner
Laporan Keuangan	SAP (PP No. 71/2010)	PSAK (IFRS/GAAP)

Perbedaan ini memengaruhi bentuk pelaporan, sistem akuntansi, serta indikator keberhasilan lembaga.

1.4 Urgensi Akuntansi Keuangan Daerah

Penerapan akuntansi keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel menjadi sangat penting karena:

- **Mendukung pengambilan keputusan berbasis data** oleh kepala daerah dan DPRD.
- **Menjadi dasar audit oleh BPK**, untuk memperoleh opini atas LKPD (WTP, WDP, TMP, Disclaimer).
- **Mendorong kepercayaan publik** terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas** sesuai prinsip *good governance*.

Menurut **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, tren perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir karena perbaikan sistem akuntansi berbasis akrual dan pelatihan SDM keuangan daerah (BPK RI, 2023).

1. Kriteria Penerapan Akuntansi Keuangan yang Baik

Untuk mencapai laporan keuangan yang **berkualitas**, akuntansi pemerintah daerah harus memenuhi kriteria:

a. Akurat

Data keuangan harus **bebas dari kesalahan material**, berdasarkan pencatatan yang tepat waktu dan berbasis akrual.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) wajib menjadi acuan.

b. Transparan

Informasi keuangan tersedia secara terbuka, mudah diakses dan dipahami oleh publik serta lembaga pengawas.

Pemerintah wajib memublikasikan laporan keuangan dan realisasi anggaran (APBD).

c. Akuntabel

Ada **pertanggungjawaban** atas setiap pengeluaran dan penerimaan, serta hasil/kinerja dari setiap program.

Dilaporkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahunan kepada BPK.